

ANALISIS PAD DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2020

Monica Vidia Putri Sefira¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono²

Program Studi Akuntansi S1
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: monicasefiraa@gmail.com¹, gideon.ak@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur 2019-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan APBD milik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020 yang ada pada website milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Perolehan sampel dalam penelitian ini didapat melalui teknik purposive sampling sehingga menghasilkan 33 sampel penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja pegawai berpengaruh secara simultan namun tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai

Abstract

This study aimed to analyze the effect of local revenue and personnel expenditures on the level of regional financial independence in East Java 2019-2020. This research used quantitative research methods using secondary data derived from the APBD reports belonging to districts/cities in East Java Province 2019-2020 which is on the website of Ministry of Finance DJPK. The sample in this study was obtained through purposive sampling technique with a total of 33 research samples. The analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with the help of SPSS software. The results of the study indicate that local revenue has a significant effect on the level of regional financial independence, while personnel expenditures have a simultaneous but not significant effect on the level of regional financial independence.

Keywords: Regional Independence Level, Regional Original Income, Employee Expenditure

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan banyak sekali pulau kecil di dalamnya (Setiawan, 2018:1). Adapun setiap pulau masih terpecah menjadi beberapa daerah bagian yang ikut menunjang berdirinya sebuah negara. Dengan latar belakang memiliki begitu banyak daerah akan menjadi kurang efisien apabila hanya pemerintah pusat

yang menjadi satu satunya pemerintahan yang mengatur dan memimpin jalannya setiap daerah di sebuah negara.

Desentralisasi menjadi jawaban atas kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah baik kabupaten maupun kota. Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah atau yang sering kita kenal dengan desentralisasi merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan otonomi daerah dan juga pemerintah daerah yang diberi wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri membuat pemerintah pusat meletakkan harapan bahwa setiap daerah dapat berkembang dan menjadi mandiri di segala aspek khususnya aspek keuangan. Pada pelaksanaannya, pemerintah pusat tetap memiliki andil meskipun wewenang telah diberikan pada masing masing daerah otonom. Pemerintah pusat membantu masing masing daerah dengan memberikan bantuan dana atau yang biasa disebut transfer dari pemerintah pusat guna mengurangi adanya kesenjangan antar daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat menjadi suatu ukuran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila sudah tidak bergantung pada pemerintah pusat, dalam hal ini berarti sebuah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian dari daerah itu sendiri (Kustianingsih et al., 2018).

Pada realisasinya masih ditemukan banyak sekali daerah yang memiliki indeks kemandirian dengan kategori belum mandiri. Kemandirian keuangan daerah sering kali menjadi permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi bahkan di banyak negara (Utari Handayani & NR, 2020). Di dalam artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia, menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki indeks kemandirian fiskal dengan kategori belum mandiri. Bahkan terdapat pula provinsi yang telah memiliki indeks kemandirian fiskal dengan kategori mandiri namun, jika dilihat lebih rinci, masih ditemukan banyak sekali kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) pada kategori belum mandiri salah satunya ialah Provinsi Jawa Timur.

Tingkat kemandirian pada Provinsi Jawa Timur ini diperkuat dengan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal

Daerah 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021, tampak bahwa selama periode 2019-2020 Provinsi Jawa Timur memiliki Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai 0,5767 dan 0,5671 pada kategori sudah mandiri akan tetapi jika melihat pada Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Daerah 2020 tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih terdapat banyak sekali kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian pada kategori belum mandiri dan menuju mandiri. Jumlah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang mana berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Daerah 2020 yang diterbitkan oleh BPK terdapat 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) pada kategori belum mandiri selama periode 2019-2020.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pendapatan asli daerah dan juga belanja pegawai. Pendapatan asli daerah merupakan pemasukan daerah yang dihasilkan dari sumber sumber milik daerah yang memiliki potensi untuk turut menaikkan perekonomian daerah itu sendiri. Jika daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya maka daerah tersebut akan dapat membiayai daerahnya sendiri dan menekan ketergantungan atas transfer dari pusat (Nur et al., 2021). Pendapatan asli daerah tidak hanya bermanfaat untuk pendanaan segala kegiatan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat namun, juga sebagai tolak ukur dari keberhasilan keikutsertaan pemerintahan daerah dalam kegiatan otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yakni menggali sumber sumber pendapatan dan membuat alokasi keuangan supaya daerahnya dapat secara mandiri mengelola keuangan (Yuliyanti et al., 2019). Hal ini didukung oleh (Nurhasanah, 2017) yang mengatakan bahwa tingkat kemandirian daerah turut disebabkan oleh pendapatan asli daerah. Belanja pegawai seharusnya menjadi

tanda bahwa ada pemeliharaan sarana publik yang dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat (Pratiwi, 2016). Belanja pegawai dapat menjadi bentuk apresiasi bagi para pekerja di daerah seperti keperluan gaji rutin pegawai hingga uang pensiun (Wahyuni, 2018), akan tetapi dapat menjadi kurang efisien jika jumlah yang dianggarkan dan dikeluarkan terlalu besar.

Teori Federalisme Fiskal

Teori *fiscal federalism* pertama kali dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972). Di dalam teori federalisme fiskal atau *fiscal federalism* mempelajari mengenai hubungan keuangan pada tingkatan pemerintahan, desentralisasi dan juga pelayanan serta kesejahteraan pada masyarakat. Teori federalisme fiskal memberikan gambaran tentang pemerintah pusat yang menjadi pusat kendali dari pemerintah daerah agar melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan aturan kelembagaan dan asumsi keinginan rakyat (Amalia & Haryanto, 2019). Teori federalisme fiskal memiliki dua persepektif dalam menggambarkan perihal desentralisasi ekonomi yakni *classical theory dan second generation theory*. Di dalam *classical theory*, menggambarkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah berbagi kewajiban dalam hal administratif serta keuangan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. *Second generation theory* menggambarkan bagaimana desentralisasi fiskal telah dibentuk agar terwujudnya informasi yang asimetris antar setiap agen politik, berbeda dengan *classical theory* yang belum menekankan pada kesejahteraan social (Porcelli, 2009).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahannya sendiri hal ini juga selaras dengan penelitian oleh (Nalle et al., 2021) bahwa otonomi daerah atau desentralisasi pada intinya merupakan pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri

baik dalam aspek keuangan, pemerintahan, dan juga administrasi. Tujuan dari diselenggarakannya kebijakan otonomi daerah tidak hanya sekedar pemberian kekuasaan pada pemerintah daerah namun, sebuah kestabilan kegiatan politik, serta meningkatnya kesejahteraan baik masyarakat dan juga setiap daerah juga dapat terlaksana.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa sebuah daerah perlu mempersiapkan segala aspek daerah, menggali sumber daya yang dimiliki dan juga memaksimalkan sumber sumber keuangan guna mendanai kebutuhan daerahnya sendiri.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai segala kegiatan pemerintahan dan kebutuhan daerahnya dengan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah ini dapat dihitung dan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Dalam Laporan Reviu Atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPK, kemandirian keuangan daerah dibagi menjadi empat indeks yakni mulai dari belum mandiri, menuju mandiri, mandiri dan sangat mandiri. Klasifikasi belum mandiri memiliki nilai 0,00-0,025. Klasifikasi menuju kemandirian memiliki nilai 0,025-0,50. Klasifikasi mandiri memiliki nilai 0,50-0,75 dan klasifikasi sangat mandiri ada pada nilai 0,75-1,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu aliran dana yang sangat dibutuhkan oleh suatu daerah. Setiap daerah akan melakukan pungutan terhadap berbagai sumber daya yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan untuk daerah berdasarkan dengan undang undang yang telah berlaku. Hal ini sejalan pula dengan yang tertulis pada Undang Undang No 33 Tahun 2004 Mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah yang menyebutkan

bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan membandingkan besarnya pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah (Nur et al., 2021).

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen dari belanja daerah yang merupakan sebuah bentuk apresiasi bagi para pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah. Belanja pegawai menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan sebuah apresiasi dalam bentuk kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada para pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan juga pensiunan atas kontribusi mereka dalam bekerja serta mendukung berlangsungnya fungsi pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Perhitungan belanja pegawai dapat dihitung jika dibandingkan dengan total dari belanja daerah (Defitri, 2020).

Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Suatu daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adanya potensi sumber daya ini perlu dimanfaatkan dan digali lebih dalam oleh setiap daerah agar dapat menghasilkan suatu pendapatan yang nantinya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Munculnya sumber pemasukan dari potensi sumber daya daerah diduga dapat membantu mengurangi tingkat ketergantungan suatu daerah pada transfer dari pemerintah pusat. Ketika suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar dari transfer pemerintah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena mampu membiayai daerahnya sendiri dan menekan angka transfer dari pemerintah pusat (Nur et al., 2021).

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, maka hipotesis pertama yang diajukan ialah:

H₁: Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja pegawai merupakan sebuah bentuk apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan khususnya oleh para perangkat pemerintahan daerah. Bentuk apresiasi berupa belanja pegawai yang tertuang sebagai gaji maupun tunjangan dirasa perlu untuk menjaga serta meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada pemerintahan daerah. Belanja pegawai juga diduga menjadi indikasi adanya kinerja yang baik dari para perangkat pemerintahan baik dalam mengelola pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Meningkatnya komposisi belanja pegawai maka meningkat pula belanja operasional serta pemeliharaan fasilitas publik yang 25 berdampak pada pelayanan masyarakat serta kinerja pemerintah daerah yang semakin baik (Rofiq, Inul, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah diberikan maka hipotesis kedua yang diajukan ialah:

H₂: Belanja Pegawai memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Laporan Realisasi APBD milik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2020 yang ada pada laman milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/> .

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dan mendapat sebanyak 33 sampel dari 38 populasi. Sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian selama dua periode yakni 33 sampel dikali 2 periode terkumpul 66 data penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang mana meliputi uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji F, uji t dan juga uji R². Teknik analisis dan pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier pertama yang dilakukan yakni ialah uji statistik deskripsi. Adapun hasil dari uji statistik deksripsi dalam penelitian ini ialah:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
PAD	66	9.00	23.00	15.2576	.47615	3.86826
Belanja Pegawai	66	23.00	50.00	38.5606	.60500	4.91506
TKKD	66	11.00	35.00	21.4091	.82445	6.69782
Valid N (listwise)	66					

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel analisis diatas, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam penelitian ini merupakan variabel X1. Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, nilai minimum 9.00, nilai maksimum 23.00, nilai rata rata (mean) 15.2576 dan standar deviasi 3.86826. Maka data yang tersebar untuk pendapatan asli daerah ada diatas rata rata sebab nilai mean lebih besar dari standar deviasi.

Belanja pegawai merupakan variabel X2 memiliki nilai minimum 23.00 sedangkan nilai maksimum 50.00, lalu nilai mean 38.5606 dan standar deviasi 4.91506. Maka data yang tersebar untuk

belanja pegawai diatas rata rata sebab nilai mean lebih besar dari standar deviasi.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) merupakan variabel Y dalam penelitian ini dan pada tabel 1 menunjukkan bahwa TKKD memiliki nilai minimum 11.00, nilai maksimum 35.00, nilai rata rata 21.4091 dan standar deviasi 6.69782. Sebaran data untuk TKKD diatas rata rata sebab nilai mean lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Berikut merupakan hasil pengujian:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1.430
Asymp. Sig. (2-tailed)	.083

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* ialah 0,083 sehingga nilai signifikansi 0,083 > 0,05. Hal ini menandakan bahwa data yang diujikan terdistribusi secara normal.

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi tiga jenis uji yakni, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk melihat apakah ada

korelasi antar variabel bebas dalam sebuah model regresi. Di dalam pengujian ini akan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance Nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi sebab $VIF = 1/Tolerance$ lalu untuk menunjukkan ada multikolinieritas maka nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018:107).

Berikut merupakan hasil dari pengujian multikolinieritas:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik-Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	.849	1.178
Belanja Pegawai	.951	1.052

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Tolerance PAD (0,849), dan Belanja Pegawai (0,951), yang mana nilai Tolerance masing masing variabel $\geq 0,10$. Nilai VIF untuk PAD (1,178), dan Belanja Pegawai (1,052), yang mana nilai VIF untuk masing masing variabel ≤ 10 . Maka tidak terdapat multikolinieritas dalam setiap variabel independent.

Pengujian asumsi klasik yang kedua ialah uji heteroskedastisitas yang bekerja dengan mengamati gambar plot antara nilai prediksi variabel independent dengan residual atau ZPRED dengan SREID. Apabila di dalam gambar tidak terdapat sebuah pola yang teratur serta data tersebar secara acak baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dapat dikatakan bahwa data yang sedang diteliti

tidak memiliki heteroskedastisitas akan tetapi, jika ditemui ada pola tertentu titik atau pola bergelombang, melebar maupun menyempit maka dapat terindikasi adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:138).

Dari hasil pengujian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dikarenakan tidak ditemukan adanya suatu pola tertentu pada model *scatterplot* dan titik titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y.

Uji asumsi klasik yang ketiga ialah uji autokorelasi yang ditujukan untuk meneliti ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1) dalam suatu model regresi linear (Ghozali, 2018:111).

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik-Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.55684	1.804

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil pengujian tampak bahwa nilai d (1,804) lalu untuk nilai du berdasarkan tabel Durbin-Watson ialah 1,651 dan hasil dari 4-du (2.349) sehingga berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi sebab nilai du < d < 4-du yakni $1,651 < 1,804 < 2,349$ dan tidak terdapat autokorelasi.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat (Nurchayyo & Riskayanto, 2018). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah merupakan variabel terikat (Y) sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai merupakan variabel bebas (X_1 dan X_2).

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-4.009	1.755	
1 PAD	1.710	.054	.988
Belanja Pegawai	-.004	.040	-.003

Sumber: Data diolah, 2022

Persamaan regresi linier yang didapat ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e.....(1)$$

$$Y = -4,009 + 1,710PAD - 0,004BP + e$$

Konstanta (a) memiliki nilai -4,009 yang berarti bahwa ketika variabel PAD dan Belanja Pegawai sama dengan nol atau dianggap tidak ada maka variabel dependen yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan sebesar 4,009.

PAD yang merupakan variabel X1 dalam penelitian ini memiliki nilai positif 1,710 yang berarti bahwa jika variabel PAD mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel Y yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

akan mengalami kenaikan sebesar 1,710 dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Belanja Pegawai merupakan variabel X2 pada penelitian ini dan memiliki nilai negatif 0,004. Hal ini menandakan bahwa ketika variabel belanja pegawai mengalami kenaikan maka akan terjadi penurunan pada variabel Y yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,004.

Pengujian pada uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan atau secara simultan.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	380.357	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pengujian variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai secara serentak dan simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebab nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$.

Uji statistik t dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari pengujian statistik t.

Tabel 7. Uji statistik t

Model	t	Sig.
Constant	-2.284	.026
PAD	31.562	.000
Belanja Pegawai	-.089	.930

Sumber: Data diolah, 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ maka dengan ini dapat dikatakan bahwa H1 diterima sebab Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan arah pengaruh positif. Pendapatan Asli Daerah dianggap memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara parsial.

Belanja Pegawai memiliki nilai signifikansi $0,930 \geq 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H2 ditolak sebab Belanja Pegawai tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja Pegawai tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara parsial.

Uji R² atau koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini

menggunakan besaran koefisien $R^2 < 1$ (Ghozali, 2018:97).
determinasi antara nol dan satu atau $0 <$

Tabel 8. Uji R^2

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.974a	.948	.946	1.55684

Sumber: Data diolah, 2022

R Square ialah sebesar 0,948 yang berarti bahwa sebesar 94,8% variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai dapat menjelaskan variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sedangkan sisanya sebesar 5,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan di dalam penelitian.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020

Berdasarkan hasil pengujian, maka hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima. Pendapatan asli daerah tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah namun, juga sebagai tolak ukur yang menunjukkan bagaimana kinerja dari pemerintahan daerah yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerah dan juga perkembangan ekonomi yang dapat berdampak pada tingkat kemandirian suatu daerah (Oktavia, 2021). Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Affifah, Riska Afiatul & Rahayu, 2021) dan (Wahyuni, 2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah akan tetapi bertentangan dengan (Puspitasari & Salisa, 2017) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan namun dengan arah negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020

Berdasarkan hasil yang didapat maka hipotesis yang mengatakan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Belanja pegawai merupakan suatu bentuk apresiasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pegawai pemerintahan daerah. Untuk meraih keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu juga didukung dengan adanya suatu komitmen yang baik dari setiap pegawai pemerintahan (Purnamasari & Rodiyah, 2017). Belanja pegawai dapat menjadi suatu apresiasi bagi para pekerja namun jika pengalokasiannya tidak tepat atau terlalu banyak dapat menyebabkan penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebab nilai belanja daerah akan bertambah (Wahyuni, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2018) dan (Defitri, 2020) bahwa belanja pegawai tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan namun berpengaruh secara simultan dengan arah pengaruh negatif akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2016) yang mengemukakan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh secara positif tetapi tidak signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian hipotesis atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020 maka kesimpulan yang didapat ialah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020 sedangkan Belanja Pegawai

tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Pegawai memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020.

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat maka saran yang dapat disampaikan untuk hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut.

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah perlu terus ditingkatkan, untuk itu bagi Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja serta mengevaluasi baik kinerja maupun kemampuan sumber daya daerahnya untuk terus beroperasi dengan baik dan meningkatkan perekonomian daerah yang akan berdampak baik pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih baik dan komprehensif dalam melakukan penelitian dengan menambahkan komitmen pegawai sebagai variabel pendukung dari penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh dari adanya komitmen pegawai dalam mengelola suatu daerah khususnya untuk mewujudkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Affifah, Riska Afiatul & Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018*. 4(1), 6.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 2020*. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkp/p/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf

CNN Indonesia. (n.d.). *10 Provinsi Yang Bergantung Dana Dari Pusat*. <https://www.cnnindonesia.com/ekono>

[mi/20210625151555-532-659434/10-provinsi-yang-bergantung-transfer-dana-dari-pusat](https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476)

Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Pengertian Belanja Pegawai*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Pengelolaan Dan Informasi Keuangan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufa=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-pegawai>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Timur*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=&pemda=>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.

N, A. F. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.

Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M.

- M. (2021). *Analysis of Regional Financial Capacity In The Context of Implementing Regional Autonomy In The Province of East Nusa Tenggara*. 17(1), 184–197.
- Nur, E., Fitriyani, I., & Suwarno, A. E. (2021). *Pengaruh PAD , DAU , Belanja Modal , Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian*. 1(1), 61–69.
- Nurchahyo, B., & Riskayanto, R. (2018). Analisis Dampak Penciptaan Brand Image Dan Aktifitas Word of Mouth (Wom) Pada Penguatan Keputusan Pembelian Produk Fashion. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i1.12026>
- Nurhasanah. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kota Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73.
- Oktavia, C. (2021). *PENGARUH PAD , TAX EFFORT , BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*.
- Porcelli, F. (2009). *Fiscal Decentralisation and Efficiency of Government . A Brief Literature Review*. January, 1–12.
- Pratiwi, N. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*. 1–18. repository.stieykpn.ac.id
- Purnamasari, D., & Rodiyah, I. (2017). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 - 2014*. 5(1), 75–92.
- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016)*. *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Rofiq, Inul, F. I. A. (2021). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. 3(3), 705–719.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi. <https://books.google.co.id/books?id=oJBiDwAAQBAJ>
- Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Wahyuni, E. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 7*,.
- Yuliyanti, L., Nugraha, N., & Fadilah, Y. K. (2019). *The Influence of Local Own-Source Revenue towards Regional Financial Independence*. 65(1cebef 2018), 4–7. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.2>